

Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Septesya Mahardhika^{1*}, Muhammad Azis², Azwar Anwar³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

* E-mail Korespondensi: septesyamahardhika2609@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 29-05-2026

Revision: 10-06-2026

Published: 14-06-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.484

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengalokasian anggaran belanja modal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan APBD serta proporsi pengalokasian belanja modal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dokumen APBD, serta laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar periode 2021–2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasi belanja modal serta menghitung persentase tingkat pencapaiannya setiap tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBD memiliki peranan penting dalam pengalokasian anggaran belanja modal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Pengalokasian belanja modal mengalami dinamika setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal daerah dan prioritas pembangunan. Tingkat realisasi belanja modal menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi pada beberapa periode. Hal ini mencerminkan adanya proses perencanaan dan pengendalian anggaran yang perlu terus dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: APBD, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pengalokasian Anggaran, Pengendalian Anggaran

A B S T R A C T

This study aims to analyze the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in capital expenditure allocation at the Makassar City Regional Revenue Agency. The focus of this research is to determine the development of the APBD and the proportion of capital expenditure allocation in supporting the implementation of the agency's duties and functions. This study

Acknowledgment

uses quantitative descriptive analysis techniques. The data used are secondary data sourced from the Budget Realization Report (LRA), APBD documents, and the financial reports of the Makassar City Regional Revenue Agency for the 2021–2024 period. Data collection techniques were conducted through documentation and interviews. Data analysis was conducted by comparing the budget and realized capital expenditures and calculating the percentage of achievement each year. The research results indicate that the Regional Budget (APBD) plays a crucial role in allocating capital expenditures at the Makassar City Regional Revenue Agency. Capital expenditure allocations fluctuate annually, influenced by regional fiscal policies and development priorities. The realization rate of capital expenditures has shown quite good results, although there are discrepancies between budgeted and actual expenditures in some periods. This reflects the need for continuous optimization of budget planning and control processes to improve the effectiveness of regional financial management.

Key word: APBD, Capital Expenditure, Locally Revenue, Budget Allocation, budget control

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola dan mengatur keuangan daerahnya secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan juga instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Nasution 2019, h. 34-35).

APBD merupakan instrumen kebijakan utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, yang sumber pendanaannya berasal dari berbagai komponen pendapatan daerah, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan (Asoka, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tingginya kontribusi PAD diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga daerah mampu membiayai kebutuhan belanja, termasuk belanja modal (Pane, Simarmata, Rezeki, Rinaldi, & Panggabean, 2021). APBD di Kota Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola keuangan daerah, khususnya terkait pengalokasian anggaran belanja modal. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yang berperan dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatan daerah, menjadi salah satu instansi kunci yang menentukan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal (Agung, Endra, & Dwi, 2024). Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas dalam mengelola urusan rumah tangganya, termasuk keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemandirian fiskal menjadi penting, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD menjadi komponen utama yang mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri (Nurlaela, 2022).

benar-benar digunakan untuk membangun sarana dan prasarana publik, memperkuat infrastruktur, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kata lain, keberhasilan pengelolaan APBD dapat dilihat dari proporsi dan efektivitas belanja modal dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan (Alfiani et al., 2024). Fenomena ini juga terjadi di Kota Makassar meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, namun realisasi pada PAD dalam APBD sering kali tidak mencapai target secara maksimal, sehingga dapat berdampak pada pengalokasian anggaran belanja modal (Nurlaela, 2022). Berikut ini dapat kita lihat dari fluktuasi capaian target APBD Kota Makassar selama periode 2021-2024.

Tabel 1. Target dan Realisasi APBD Bapenda Kota Makassar 2021-2024
(dalam Rp Miliar)

Tahun	Target PAD (Rp Miliar)	Realisasi PAD (Rp Miliar)	Persentase Realisasi (%)
2021	1.005,02	930,26	92,56
2022	1.377,70	1.195,23	86,76
2023	1.500,06	1.372,23	91,48
2024	1.760,00	1.422,99	80,85

Sumber: Bapenda Kota Makassar, 2025

Berdasarkan data dari tabel. 1 persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD menunjukkan bahwa, pada tahun 2021, tingkat realisasi PAD tercatat sebesar 92,56% dari target yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan capaian yang cukup baik karena mendekati target yang direncanakan.

Namun, pada tahun 2022 persentase realisasi PAD menurun menjadi 86,76%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pencapaian target pendapatan, meskipun secara nominal realisasi PAD tahun tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023, persentase realisasi PAD kembali meningkat menjadi 91,48%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah, meskipun capaian tersebut masih sedikit di bawah realisasi pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2024, persentase realisasi PAD justru mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu hanya mencapai 80,85%. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun target PAD ditetapkan lebih tinggi, realisasi yang diperoleh tidak sejalan dengan target yang diharapkan, sehingga capaian persentase realisasi menjadi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pencapaian target PAD Kota Makassar selama periode 2021–2024 bersifat fluktuatif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 92,56% dan capaian terendah pada tahun 2024 sebesar 80,85%. Hal ini menggariskan perlunya strategi yang lebih efektif dalam optimalisasi sumber-sumber PAD agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara konsisten.

Ada juga penelitian dari Musaid & Asrida, (2021) menjelaskan bahwa meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ambon mengalami peningkatan, alokasi belanja modal justru mengalami penurunan dari tahun 2016–2018. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah turun dari 20,14% pada tahun 2016 menjadi 17,48% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan PAD dengan pengalokasian belanja modal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum tentu diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam alokasi belanja modal. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kemampuan fiskal daerah dengan prioritas belanja pemerintah daerah. Dengan kata lain, meskipun pendapatan daerah mengalami peningkatan, pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan daerah belum sepenuhnya optimal. Situasi ini mempertegas pentingnya menganalisis bagaimana proses pengalokasian belanja modal dilakukan, agar dapat dipahami

apakah anggaran yang tersedia telah dikelola secara efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik.

Adapun penjelasan mengenai tentang pengalokasian anggaran belanja modal merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen keuangan daerah karena berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan pelayanan publik. Berikut ini dapat kita lihat Target dan Realisasi dalam Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kota Makassar selama periode 2021-2024.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Bapenda Kota Makassar 2021-2024 (dalam Rp Miliar)

Tahun	Anggaran Perubahan Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Capaian terhadap Target Perubahan (%)
2021	2,548	1,079	42,34
2022	13,155	11,825	89,89
2023	6,773	6,214	91,74
2024	6,998	6,467	92,41

Sumber: Bapenda Kota Makassar, 2025

Berdasarkan data dari tabel 2 yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, diketahui bahwa informasi terkait anggaran belanja modal yang tersedia hanya terfokus pada belanja modal peralatan dan mesin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyajian data, instansi tersebut masih membatasi ruang lingkup belanja modal pada komponen tertentu yang dianggap paling dominan dan strategis dalam menunjang operasional serta pelayanan publik. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini lebih diarahkan pada realisasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagai representasi dari kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal di lingkungan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Kondisi ini menjadi penting untuk diteliti, karena meskipun data yang tersedia hanya pada belanja modal peralatan dan mesin, komponen tersebut tetap memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan anggaran belanja modal. Penelitian (Riswati & Bukhotri, 2023) menunjukkan bahwa peralatan dan mesin merupakan aset tetap yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan, khususnya dalam mendukung kegiatan administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah.

Maka berdasarkan dari data tersebut yang ada pada tabel. 2 menunjukkan bahwa, pada tahun 2021, capaian realisasi terhadap target perubahan hanya berada pada angka 42,34%. Persentase tersebut memperlihatkan bahwa realisasi anggaran belanja modal masih tergolong

rendah karena belum mencapai setengah dari target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dengan capaian sebesar 89,89%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan anggaran sehingga kinerja pengelolaan belanja modal semakin efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 persentase realisasi kembali mengalami peningkatan menjadi 91,74%, yang menandakan bahwa pemerintah daerah semakin konsisten dalam merealisasikan belanja modal mendekati target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian sebesar 92,41%, yang merupakan angka tertinggi selama periode penelitian ini.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja modal Kota Makassar menunjukkan perkembangan yang positif karena berhasil memperbaiki capaian dari kondisi rendah pada tahun 2021 hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi pada tahun 2024. Melihat kenyataan ini, terdapat celah penelitian atau *research gap* yang dapat dikaji lebih mendalam. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kaitannya dengan pembangunan daerah.

METODE

Design yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif. Desain deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Badan Pendapatan Daerah Kota. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, yang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan belanja pegawai dan belanja modal. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada kesesuaian objek penelitian dengan fokus penelitian, yaitu analisis APBD dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai dan belanja modal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Selain itu, Bapenda Kota Makassar dipilih karena memiliki peranan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan pengolahan data penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya data belanja pegawai dan belanja modal pada

Bapenda Kota Makassar. Selain itu, peneliti juga melaksanakan wawancara pada bulan Februari 2026 selama satu minggu sebagai data pendukung untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait pengelolaan APBD serta pelaksanaan pengalokasian anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan dokumen resmi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Penjabaran APBD, serta Laporan APBD yang diterbitkan oleh Bapenda Kota Makassar pada periode 2021–2024.

Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan yaitu rumus persentase realisasi APBD.

$$\text{Persentase Realisasi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Anggaran APBD}} \times 100\%$$

Rumus ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara anggaran belanja modal yang direncanakan dalam APBD dengan realisasi belanja modal yang dicapai setiap tahunnya.

$$\text{Persentase realisasi Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Anggaran Belanja Modal}} \times 100\%$$

Adapun rumus perhitungan persentase realisasi yang digunakan adalah rasio belanja modal.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu terdiri dari mengumpulkan data-data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2021–2024, khususnya terkait pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal. Menganalisis kontribusi PAD dalam APBD terhadap total pendapatan daerah serta proporsi alokasi APBD pada pengalokasian anggaran belanja modal dalam tiap tahunnya. Melakukan analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan data hasil wawancara sebagai data pendukung, serta hasil dari data dokumentasi tersebut untuk melihat seberapa besar keterkaitan antara perkembangan APBD dengan belanja modal setiap tahunnya, dan Menarik kesimpulan mengenai peranan APBD dalam pengalokasian belanja modal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

HASIL

APBD khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. PAD terdiri dari beberapa komponen, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk mengetahui perkembangan PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, berikut disajikan data target dan realisasi PAD selama periode penelitian.

Tabel 2 Target dan Realisasi PAD dalam APBD Bapenda Kota Makassar 2021-2024
(dalam Rp Miliar)

Tahun	Target PAD (Rp Miliar)	Realisasi PAD (Rp Miliar)	Persentase Realisasi (%)
2021	1.005,02	930,26	92,56
2022	1.377,70	1.195,23	86,76
2023	1.500,06	1.372,23	91,48
2024	1.760,00	1.422,99	80,85

Sumber: Bapenda Kota Makassar, 2025

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perbedaan antara target dan realisasi PAD menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki, yang selanjutnya berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja, termasuk belanja modal.

APBD khususnya pada Belanja Daerah (Gaji pegawai)

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen belanja daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan hak-hak pegawai negeri, seperti gaji dan tunjangan. Penyajian data belanja pegawai diperlukan untuk mengetahui besarnya proporsi belanja pegawai dalam APBD Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Dalam penelitian ini, belanja pegawai salah satu bagian dari APBD yaitu alokasi pengeluaran

daerah untuk membayar pengeluaran rutin yang sifatnya mengikat dan wajib diprioritaskan untuk memastikan kelancaran operasional birokrasi serta pelayanan publik.

Komponen dari belanja pegawai mencakup gaji pokok, tambahan penghasilan, hingga uang makan. Namun Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, porsi anggaran ini dibatasi maksimal 30% dari total belanja PABD agar keuangan daerah tetap produktif.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi APBD (Belanja Pegawai) Bapenda Kota Makassar 2021-2024 (dalam Rp Miliar)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2021	57,26	38,63
2022	68,35	47,46
2023	57,45	50,52
2024	62,29	56,92

Sumber: Bapenda Kota Makassar, 2025

Berdasarkan tabel 4 tersebut, realisasi belanja pegawai belum sepenuhnya mencapai anggaran yang direncanakan. Perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pegawai dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi keuangan daerah.

Belanja Modal khususnya Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Peralatan dan mesin merupakan bagian dari belanja modal yang digunakan untuk menunjang operasional dan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Oleh karena itu, penyajian data belanja modal peralatan dan mesin penting untuk mengetahui sejauh mana pengalokasian anggaran tersebut telah direncanakan dan direalisasikan.

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Peralatan dan Mesin) Bapenda Kota Makassar 2021-2024 (dalam Rp Miliar)

Tahun	Anggaran Perubahan Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Capaian terhadap Target Perubahan (%)
2021	2,548	1,079	42,34
2022	13,155	11,825	89,89
2023	6,773	6,214	91,74
2024	6,998	6,467	92,41

Sumber: Bapenda Kota Makassar, 2025

Berdasarkan tabel 5 tersebut, terlihat adanya selisih antara anggaran perubahan dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin. Realisasi yang lebih rendah dibandingkan anggaran perubahan menunjukkan bahwa tidak seluruh alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin dapat direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian realisasi anggaran dari tahun ke tahun dengan cara membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Analisis ini didasarkan pada data dokumentasi yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja pegawai sebagai bagian dari belanja daerah, serta belanja modal khususnya belanja modal peralatan dan mesin. Adapun capaian realisasi pada data-data dokumentasi dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 6 Laporan Target dan Realisasi PAD dalam APBD Bapenda Kota Makassar 2021-2024 (dalam Rp Miliar)

Tahun	Target PAD (Rp Miliar)	Realisasi PAD (Rp Miliar)	Persentase Realisasi (%)
2021	1.005,03	930,26	92,56
2022	1.377,71	1.195,23	86,76
2023	1.500,07	1.372,23	91,48
2024	1.760,00	1.422,99	80,85

Sumber: Bapenda Kota Makassar, 2025

Tingkat Realisasi APBD 2021

$$\text{Persentase Realisasi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Anggaran APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Anggaran/Target APBD} = 1.005,03$$

$$\text{Anggaran Realisasi APBD} = 930,26$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Realisasi APBD} &= \frac{930,26}{1.005,03} \times 100\% \\ &= 0,9256 \times 100\% \\ &= 92,56\% \end{aligned}$$

Tingkat Realisasi APBD 2022

$$\text{Persentase Realisasi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Anggaran APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Anggaran/Target APBD} = 1.377,71$$

$$\text{Anggaran Realisasi APBD} = 1.195,23$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase Realisasi APBD} &= \frac{1.195,23}{1.377,71} \times 100\% \\ &= 0,8675 \times 100\% \\ &= 86,76\%\end{aligned}$$

Tingkat Realisasi APBD 2023

$$\text{Persentase Realisasi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Anggaran APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Anggaran/Target APBD} = 1.500,07$$

$$\text{Anggaran Realisasi APBD} = 1.372,23$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase Realisasi APBD} &= \frac{1.372,23}{1.500,07} \times 100\% \\ &= 0,9147 \times 100\% \\ &= 91,48\%\end{aligned}$$

Tingkat Realisasi APBD 2024

$$\text{Persentase Realisasi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Anggaran APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Anggaran/Target APBD} = 1.760,00$$

$$\text{Anggaran Realisasi APBD} = 1.422,99$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase Realisasi APBD} &= \frac{1.422,99}{1.760,00} \times 100\% \\ &= 0,8085 \times 100\% \\ &= 80,85\%\end{aligned}$$

Berdasarkan pada tabel 6 diatas, diketahui bahwa pada tahun 2021, tingkat realisasi PAD tercatat sebesar 92,56% dari target yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan capaian yang cukup baik karena mendekati target yang direncanakan.

Namun, pada tahun 2022 persentase realisasi PAD menurun menjadi 86,76%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pencapaian target pendapatan, meskipun

secara nominal realisasi PAD tahun tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023, persentase realisasi PAD kembali meningkat menjadi 91,48%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah, meskipun capaian tersebut masih sedikit di bawah realisasi pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2024, persentase realisasi PAD justru mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu hanya mencapai 80,85%. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun target PAD ditetapkan lebih tinggi, realisasi yang diperoleh tidak sejalan dengan target yang diharapkan, sehingga capaian persentase realisasi menjadi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pencapaian target PAD Kota Makassar selama periode 2021–2024 bersifat fluktuatif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 92,56% dan capaian terendah pada tahun 2024 sebesar 80,85%. Hal ini menggariskan perlunya strategi yang lebih efektif dalam optimalisasi sumber-sumber PAD agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara konsisten.

Tabel 7. Laporan Anggaran dan Realisasi APBD (Belanja Pegawai) Bapenda Kota Makassar 2021-2024 (dalam Rp Miliar)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2021	57,26	38,63
2022	68,35	47,46
2023	57,45	50,52
2024	62,29	56,92

Sumber: Bapenda Kota Makassar, 2025

Perhitungan perbandingan anggaran belanja pegawai tahun ke tahun Anggaran tahun 2022 terhadap 2021

Perbandingan Anggaran(%)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Anggaran T Berjalan} - \text{Anggaran T Sebelumnya}}{\text{Anggaran T Sebelumnya}} \times 100\% \\
 &= \frac{68,35 - 57,26}{57,26} \times 100\% \\
 &= 0,1936 \times 100\% \\
 &= 19,36\%
 \end{aligned}$$

Anggaran belanja pegawai tahun 2022 meningkat 19,36% dibandingkan tahun 2021.

Tahun 2023 terhadap 2022

Perbandingan Anggaran(%)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Anggaran T Berjalan} - \text{Anggaran T Sebelumnya}}{\text{Anggaran T Sebelumnya}} \times 100\% \\ &= \frac{57,45 - 68,35}{68,35} \times 100\% \\ &= 0,15941 \times 100\% \\ &= 15,94\% \end{aligned}$$

Anggaran belanja pegawai tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 15,94%

Tahun 2024 terhadap 2023

Perbandingan Anggaran(%)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Anggaran T Berjalan} - \text{Anggaran T Sebelumnya}}{\text{Anggaran T Sebelumnya}} \times 100\% \\ &= \frac{62,29 - 57,45}{57,45} \times 100\% \\ &= 0,08417 \times 100\% \\ &= 8,42\% \end{aligned}$$

Anggaran belanja pegawai tahun 2024 kembali meningkat sebesar 8,42%

Perhitungan perbandingan realisasi belanja pegawai tahun ke tahun Realisasi tahun 2022 terhadap 2021

$$\begin{aligned} \text{Perbandingan Realisasi}(\%) &= \frac{\text{Realisasi T Berjalan} - \text{Realisasi T Sebelumnya}}{\text{Realisasi T Sebelumnya}} \times 100\% \\ &= \frac{47,46 - 38,63}{38,63} \times 100\% \\ &= 0,2286 \times 100\% \\ &= 22,86\% \end{aligned}$$

Realisasi belanja pegawai tahun 2022 meningkat 22,88%

Tahun 2023 terhadap 2022

$$\begin{aligned} \text{Perbandingan Realisasi}(\%) &= \frac{\text{Realisasi T Berjalan} - \text{Realisasi T Sebelumnya}}{\text{Realisasi T Sebelumnya}} \times 100\% \\ &= \frac{50,52 - 47,46}{47,46} \times 100\% \\ &= 0,0644 \times 100\% \\ &= 6,44\% \end{aligned}$$

Realisasi belanja pegawai tahun 2023 meningkat sebesar 6,44%

Tahun 2024 terhadap 2023

$$\begin{aligned}\text{Perbandingan Realisasi(\%)} &= \frac{\text{Realisasi T Berjalan} - \text{Realisasi T Sebelumnya}}{\text{Realisasi T Sebelumnya}} \times 100\% \\ &= \frac{56,92-50,52}{50,52} \times 100\% \\ &= 0,1267 \times 100\% \\ &= 12,67 \%\end{aligned}$$

Berdasarkan pada tabel 7 menunjukkan Realisasi belanja pegawai pada tahun 2024 meningkat sebesar 12,67% Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Pegawai pada Bapenda Kota Makassar selama periode 2021–2024, dapat diketahui bahwa anggaran dan realisasi belanja pegawai mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada komponen belanja pegawai.

Pada tahun 2022, anggaran belanja pegawai mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan anggaran tersebut sejalan dengan realisasi belanja pegawai yang juga mengalami kenaikan. Realisasi belanja pegawai tahun 2022 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan belanja pegawai serta optimalisasi penyerapan anggaran pada tahun tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2023, anggaran belanja pegawai mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Meskipun demikian, realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pengurangan alokasi anggaran, pelaksanaan belanja pegawai masih dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, laju peningkatan realisasi pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan peningkatan yang terjadi pada tahun 2022, yang mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan realisasi belanja pegawai.

Pada tahun 2024, anggaran belanja pegawai kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Peningkatan anggaran tersebut diikuti oleh peningkatan realisasi belanja pegawai yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran belanja pegawai, serta meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, perbandingan anggaran dan realisasi belanja pegawai selama periode 2021–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, sementara realisasi belanja pegawai cenderung menunjukkan tren peningkatan meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika dalam pengelolaan APBD, khususnya dalam pengalokasian dan pelaksanaan belanja pegawai di Bapenda Kota Makassar.

Fluktuasi anggaran dan realisasi belanja pegawai tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan APBD masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil, sehingga alokasi anggaran dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung kinerja organisasi.

Tabel 8. Laporan Anggaran dan Realisasi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)Bapenda Kota Makassar 2021-2024 (dalam Rp Miliar)

Tahun	Anggaran Perubahan Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Capaian terhadap Target Perubahan (%)
2021	2,548	1,079	42,34
2022	13,155	11,825	89,89
2023	6,773	6,214	91,74
2024	6,998	6,467	92,41

Sumber: Bapenda Kota Makassar, 2025

Tingkat Realisasi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 2021

$$\text{Persentase realisasi Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Anggaran Belanja Modal}} \times 100\%$$

$$\text{Anggaran Belanja Modal} = 2,548$$

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = 1,079$$

$$\text{Persentase realisasi Belanja Modal} = \frac{1,079}{2,548} \times 100\%$$

$$= 0,4234 \times 100\%$$

$$= 42,34\%$$

Tingkat Realisasi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 2022

$$\text{Persentase realisasi Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Anggaran Belanja Modal}} \times 100\%$$

$$\text{Anggaran Belanja Modal} = 13,155$$

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = 11,825$$

$$\text{Persentase Realisasi Belanja Modal} = \frac{11,825}{13,155} \times 100\%$$

$$= 0,8989 \times 100\%$$

$$= 89,89\%$$

Tingkat Realisasi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 2023

$$\text{Persentase realisasi Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Anggaran Belanja Modal}} \times 100\%$$

$$\text{Anggaran Belanja Modal} = 6,773$$

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = 6,214$$

$$\text{Persentase Realisasi Belanja Modal} = \frac{6,214}{6,773} \times 100\%$$

$$= 0,9174 \times 100\% = 91,74 \%$$

Tingkat Realisasi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 2024

$$\text{Persentase realisasi Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Anggaran Belanja Modal}} \times 100\%$$

$$\text{Anggaran Belanja Modal} = 6,998$$

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = 6,467$$

$$\text{Persentase Realisasi Belanja Modal} = \frac{6,467}{6,998} \times 100\%$$

$$= 0,9241 \times 100\%$$

$$= 92,41\%$$

Berdasarkan dari data tersebut yang ada pada tabel 8 menunjukkan bahwa, pada tahun 2021, capaian realisasi terhadap target perubahan hanya berada pada angka 42,34%. Persentase tersebut memperlihatkan bahwa realisasi anggaran belanja modal masih tergolong rendah karena belum mencapai setengah dari target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dengan capaian sebesar 89,89%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan anggaran sehingga kinerja pengelolaan belanja

modal semakin efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 persentase realisasi kembali mengalami peningkatan menjadi 91,74%, yang menandakan bahwa pemerintah daerah semakin konsisten dalam merealisasikan belanja modal mendekati target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian sebesar 92,41%, yang merupakan angka tertinggi selama periode penelitian ini.

Berdasarkan data dari tabel 8 yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, diketahui bahwa informasi terkait anggaran belanja modal yang tersedia hanya terfokus pada belanja modal peralatan dan mesin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyajian data, instansi tersebut masih membatasi ruang lingkup belanja modal pada komponen tertentu yang dianggap paling dominan dan strategis dalam menunjang operasional serta pelayanan publik. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini lebih diarahkan pada realisasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagai representasi dari kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal di lingkungan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Selanjutnya, untuk mengetahui perbandingan antara belanja modal dengan total belanja daerah, digunakan rasio belanja modal sebagai alat analisis. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi belanja modal terhadap total realisasi belanja daerah yang dapat dilihat langsung dalam bentuk persentase.

Tabel 9. Laporan Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Bapenda Kota Makassar 2021-2024 (dalam Rp Miliar)

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp Miliar)	Realisasi Belanja Daerah (Rp Miliar)	Persentase Realisasi (%)
2021	1,079	38,63	2,79
2022	11,825	47,46	24,91
2023	6,214	50,52	12,30
2024	6,467	56,92	11,36

Sumber: Bapenda Kota Makassar, 2025

Perhitungan Perbandingan realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah Tahun 2021

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = 1,079$$

$$\text{Realisasi Belanja Daerah} = 38,63$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{1,079}{38,63} \times 100\%$$

$$= 0,2793 \times 100\%$$

$$= 27,93\%$$

Tahun 2022

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = 11,825$$

$$\text{Realisasi Belanja Daerah} = 47,46$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{11,825}{47,46} \times 100\%$$

$$= 2,4915 \times 100\%$$

$$= 49,15\%$$

Tahun 2023

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = 6,214$$

$$\text{Realisasi Belanja Daerah} = 50,52$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{6,214}{50,52} \times 100\%$$

$$= 1,2300 \times 100\%$$

$$= 23,00\%$$

Tahun 2024

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = 6,467$$

$$\text{Realisasi Belanja Daerah} = 56,92$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{6,467}{56,92} \times 100\%$$

$$= 1,1361 \times 100\%$$

$$= 13,61\%$$

Berdasarkan data tabel 9 diatas, dapat dilihat bahwa perbandingan antara realisasi belanja modal dengan total belanja daerah dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami naik turun. Pada tahun 2021, persentase realisasi belanja modal sebesar 27,93%, yang berarti sebagian belanja daerah sudah digunakan untuk belanja modal dalam jumlah yang cukup. Pada tahun 2022, persentasenya meningkat menjadi 49,15%. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023 persentasenya menurun menjadi 23,00%. Hal ini menandakan bahwa porsi belanja modal mulai berkurang dibandingkan dengan total belanja daerah. Penurunan juga terjadi pada tahun 2024, yaitu menjadi 13,61%, yang merupakan nilai paling rendah selama periode tersebut. Artinya, penggunaan anggaran untuk belanja modal semakin kecil dibandingkan dengan belanja daerah secara keseluruhan.

Pembahasan

Pada pembahasan penelitian ini, penulis menjelaskan keterkaitan teori yang digunakan dengan hasil penelitian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam penelitian ini, fokus pembahasan diarahkan pada Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, serta pengalokasian anggaran belanja modal khususnya pada peralatan dan mesin. Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Oleh karena itu, penulis menguraikan secara rinci berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan APBD agar pembaca dapat memahami proses perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi anggaran yang dilakukan oleh instansi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Y. Devinci, Dekrita, & Samosir, (2022), pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa untuk menilai pengelolaan anggaran, perlu diketahui besarnya anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi yang berhasil dicapai. Dalam konteks Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pengelolaan dapat dilihat melalui perbandingan antara target anggaran dengan realisasi penerimaan yang dicapai pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), diketahui bahwa realisasi PAD pada Bapenda Kota Makassar selama periode penelitian mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada beberapa tahun, realisasi PAD mampu mendekati bahkan mencapai target yang telah ditetapkan, sementara pada tahun lainnya realisasi PAD masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan PAD dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi potensi pendapatan maupun kondisi ekonomi dan kebijakan daerah. Selanjutnya, hasil penelitian terhadap belanja daerah yang difokuskan pada belanja pegawai menunjukkan bahwa anggaran belanja pegawai mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Perbandingan anggaran belanja pegawai menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan alokasi anggaran pada periode tertentu. Namun demikian, realisasi belanja pegawai secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Kondisi ini mengindikasikan bahwa belanja pegawai merupakan komponen belanja yang relatif stabil dan wajib dipenuhi dalam pengelolaan APBD. Berikutnya pengalokasian anggaran belanja modal yang ada dalam penelitian ini difokuskan pada belanja peralatan dan mesin menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi belanja modal peralatan dan mesin, diketahui bahwa realisasi belanja modal mengalami peningkatan pada beberapa tahun anggaran. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik melalui penyediaan aset tetap yang memadai.

Selain itu, dalam penelitian ini, juga terdapat analisis data untuk mengukur realisasi belanja modal terhadap belanja daerah yang disebut rasio belanja modal. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi belanja modal dengan belanja daerah dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami naik turun. Di awal sempat meningkat, tetapi setelah itu justru menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara APBD dalam Belanja Modal terlihat bahwa pergerakan realisasi APBD tidak selalu sejalan dengan realisasi belanja modal. Meskipun capaian PAD dalam APBD mengalami naik turun, realisasi belanja modal justru terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja modal tetap menjadi prioritas pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, khususnya melalui pengadaan peralatan dan mesin. Hal tersebut juga mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran belanja modal sudah berjalan cukup baik dari sisi realisasi, meskipun dari sisi pendapatan daerah

masih perlu ditingkatkan agar lebih stabil dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara optimal. Dan untuk perbandingan realisasi belanja modal terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk belanja modal tidak tetap setiap tahun, karena adanya perubahan dalam pengalokasian belanja daerah.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengelolaan dan pengalokasian anggaran belanja daerah, khususnya belanja modal. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asterius dkk (2021), menganalisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2015–2019 dengan menggunakan analisis kinerja pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah secara umum tergolong baik, namun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi, serta belum tercapainya keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nirwana (2020) meneliti kinerja APBD dengan meninjau efektivitas pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja, termasuk belanja modal. Dan ketiga, penelitian oleh Nurlela (2022) mengkaji pengelolaan APBD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah melalui belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal sangat dipengaruhi oleh kondisi pendapatan daerah serta kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas anggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia selama periode 2010–2024, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif namun tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi domestik lebih banyak didorong oleh berkembangnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dibandingkan oleh perubahan tingkat pengangguran. Urbanisasi menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi PMDN karena mampu menciptakan pasar yang lebih luas, meningkatkan ketersediaan tenaga kerja, serta memperkuat aktivitas ekonomi yang menarik bagi investor. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil turut meningkatkan optimisme investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi. Pengelolaan urbanisasi juga perlu diarahkan pada pengembangan kawasan perkotaan yang produktif, inklusif, dan didukung oleh infrastruktur yang memadai agar mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi pmdn, seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, kualitas infrastruktur, dan kemudahan berusaha sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi investasi domestik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G., Endra, M., Dwi, P., Diii, P. S., Akuntansi, J., & Bali, P. N. (2024). *Belanja Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Periode 2021-2023 Belanja Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Periode 2021-2023*.
- Alfiani, A., Armeliza, D., & Nasution, H. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, 1(2), 74–87. <https://doi.org/10.56442/h23web39>
- Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(2), 51-70.
- Asoka, R. (2019). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmanyah*, 2(2), 76. <https://doi.org/10.51877/jiar.v2i2.84>
- Devinci, M. Y., Dekrita, Y. A., & Samosir, M. S. (2022).
- Dewi, C. W. K. ., Arini, A. P. ., Fanida, E. H. ., & Hidayat, M. F. . (2026). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Periode 2020 – 2024 melalui Pendekatan Rasio Keuangan Daerah . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 544–556. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.253>
- Diwa, A., Djou, L. D. G., & Kapa, S. (2021). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Danbelanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(1), 49–56. <https://doi.org/10.37478/jria.v2i1.2149>
- Fadlan. (2019). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH P ENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIGI TAHUN 2016-2019*.
- Fitriani, Baharuddin, D., Purnama, H. R., & Makhnun, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pengeluaran Pemerintah. *Center of*

Economic Students Journal, 6(1), 81–90. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i1.573>

- Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P. S., Umroh, R. U. Z., & Kusumadewi, R. T. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 154–164. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.175>
- Karimuddin, A., Jannah, M., Hasda, S., Fadila, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Madjid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta* (Issue 25). [http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Da na_Umum_Genera.docx](http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Da_na_Umum_Genera.docx)
- Mohamad, A. R., Abdullah, J., & Hasan, W. (2023). Analisis pencatatan penyusutan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(1), 19–29
- Musaid, S. A., & Asrida, W. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Ambon. *Journal of Applied Accounting*, 1(1), 24–26. <https://doi.org/10.52158/jaa.v1i1.83>
- Nandani, S. C. D., Setyadin, B., & Nurabadi, A. (2018). *ANALISIS ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH*. 1(1), 22–28.
- Nasrullah, A., Baharuddin, D., & Nujum, S. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Wajo*. 4(2), 122–129.
- Nasution, D. A. D. (2019). Akuntansi sektor publik: Mahir dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nirwana, E. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Oku Periode 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 18. <https://doi.org/10.36448/jak.v11i1.1393>
- Noor, H. Q. ., Yudawisastra, H. G. ., & Hanim, W. (2026). Analisis Penilaian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di Kota X. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 623–639. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.264>
- Nurlaela, N. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Badan Pendapatan Daerah Kotamakassar. *Jurnal Ilmiah Neraca : Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 5(1), 49–64. <https://doi.org/10.56070/jinema.v5i1.51>
- Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 31–44. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3182>
- Purwati, A., Sahusilawane, W., Yanti, L. D., Oktari, Y., Setyowati, L., Ikhyannuddin, Sugianto,

- Usman, E., Waoma, S., Bakri, A. A., Durya, N. P. M. A., Novianti, R., Nandiroh, U., Sutrisno, C. R., Susanto, E., & Kalsum, U. (2023). *Akuntansi Sektor Publik*. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Putra, G. H., & Rivandi, M. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus dalam Kaitannya dengan Kemandirian Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 140–152.
- Riswati, & Bukhotri, Y. (2023). Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal Dan Daerah Di Pemerintahan Daerah Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 10, 41–55.
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.
- Saputra, I., Rahmadiyah, Fingkania, A., Devi, S., & Devi, I. (2025). Pengaruh Lingkungan Kerja, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 187–194. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i3.104>
- Sartika, D., Ridwan, R., Gainau, P. C., Setyowati, W., Arshandy, E., Sari, R. P., Hantono, Hermelinda, T., Sopanah, A., Aprianti, S., Dwitayanti, Y., Andhayani, A., Rusdianti, I. S., Afriansyah, B., Sinaga, I., & Anshori, S. (2024). *Akuntansi sektor publik*. Banjaran: Penerbit CV. Eureka Media
- Shafwah, R. (2023). Analisis Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2021. *Paraduta : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 60–67. <https://doi.org/10.56630/paraduta.v1i2.470>
- Simamora, O., Rizal, Y., & Syahputra, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kota Langsa Provinsi Aceh Periode 2012-2021. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(11), 1498–1507. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i11.626>
- Sitepu, H. V., Slamet, B., Putri, F. C., Antoni, E., Silviana, Ungkari, M. D., Mila, S., Riwayati, A., Sari, K. R., Wibowo, A. S., & Bahiyah, K. (2024). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik : Teori Dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia.
- Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238. <https://doi.org/10.18196/rab.030247>
- Wulandari, S. P. ., Febrianti, A. P., Jamaluddin, J., & Ansar, M. (2026). Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 1). *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 1189–1190. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.335>